

Respons Vaccine-Derived Poliovirus di Indonesia

Laporan situasi no. 25
23 Juni–23 Juli 2024



Akses [versi bahasa Inggris](#)



Daftar isi:

- [Situasi terkini](#)
- [Perencanaan dan koordinasi](#)
- [Pelaksanaan PIN polio](#)
- [Surveilans](#)
- [Masalah utama dan rencana tindak lanjut](#)



7 kasus cVDPV2

- **Aceh:**
 - 1 kasus lumpuh layu di Pidie
 - 1 kasus lumpuh layu di Aceh Utara
 - 1 kasus lumpuh layu di Bireuen
- **Jawa Barat:**
 - 1 kasus lumpuh layu di Purwakarta
- **Jawa Tengah:**
 - 1 kasus lumpuh layu di Klaten
- **Jawa Timur:**
 - 1 kasus lumpuh layu di Pamekasan
 - 1 kasus lumpuh layu di Sampang
- **Jawa Timur:**
 - 1 kasus lumpuh di Pandeglang

Tingkat KLB: **2**

Respons KLB:

- Jawa Timur dan Jawa Tengah: Anak 0–7 tahun
- Sleman, Di Yogyakarta: Anak 0–7 tahun

Konfirmasi KLB:

- Total kasus AFP dengan cVDPV2: 3
- Total anak sehat yang terinfeksi cVDPV2: 9

Tanah Papua

- 1** kasus VDPV1
 - 1 kasus lumpuh layu di Mimika
- 8** kasus cVDPV2-n
 - 8 anak sehat terinfeksi di Mimika
 - 1 kasus lumpuh layu di Mimika
- 5** kasus cVDPV2-n
 - 1 kasus lumpuh layu di Nduga & Mimika
 - 3 anak sehat terinfeksi
- 2** kasus VDPV2-n
 - 1 kasus lumpuh layu di Asmat and Mappi

Jawa Timur

- 1** kasus VDPV2-n
 - 1 kasus lumpuh layu di Sidoarjo

¹ cVDPV2: *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus type 2*.
cVDPV2-n: *Circulating Vaccine-Derived Poliovirus type 2* dari vaksin nOPV2.
VDPV2-n: *Vaccine-Derived Poliovirus type 2* dari vaksin nOPV2.
VDPV1: *Vaccine-Derived Poliovirus type 1*.

RESPONS KLB POLIO

PIN Polio di 6 Provinsi di Tanah Papua dan 27 Provinsi di Indonesia (selain Aceh, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sleman DIY)

Perencanaan dan koordinasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah meresmikan pelaksanaan pekan imunisasi nasional (PIN) polio pada tanggal 23 Juli 2024. PIN polio ini akan dilaksanakan secara dua tahap: Pulau Papua dan 27 provinsi sisanya. Dalam persiapan PIN polio, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan surat edaran untuk mengajak pemerintah daerah memberikan upaya optimal dalam pelaksanaan PIN. Kemenkes dan mitra pembangunan juga bekerja sama dalam perencanaan dan koordinasi baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Surveilans

WHO dan dinas kesehatan (dinkes) provinsi dan kabupaten/kota melakukan kajian rekam medis (*hospital record review*) mengenai kasus AFP dan melakukan berbagai HRR di berbagai rumah sakit. Dari hasil kegiatan ini, dinas Kesehatan kabupaten/kota akan meningkatkan surveilans aktif di rumah sakit dan masyarakat dan membentuk tim surveilans aktif rumah sakit (SARS).

Pelaksanaan PIN polio

Kemenkes mengarahkan dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan mitra pembangunan agar mengupayakan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan PIN polio. WHO menjalankan upaya-upaya berupa peninjauan langsung, pendampingan teknis, rapat evaluasi, validasi data, dan memberikan umpan balik. UNICEF juga memberikan pendampingan teknis dalam pengolahan data capaian dan cakupan pada tingkat desa.

Mobilisasi sosial

Mitra dan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya mobilisasi sosial seperti pengiriman *broadcast* pesan WhatsApp, kegiatan sosialisasi di media dan sekolah, dan diseminasi video himbauan singkat dari pemangku kebijakan.



Presiden RI, Joko Widodo, Ibu Presiden Iriana, dan Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin meresmikan PIN Polio di Jayapura, Papua.
Kredit: Biro pers media dan informasi sekretariat presiden/Muchlis Jr

Masalah utama di Tanah Papua

- Cakupan imunisasi yang rendah di wilayah sulit dijangkau dan memiliki isu keamanan
- Pelaksanaan monitor dan supervisi yang masih rendah
- Keterbatasan biaya pelaksanaan PIN polio
- Rendahnya komitmen dari dinkes terkait untuk menindaklanjuti pelayanan PIN polio
- Kurangnya pergerakan masyarakat dalam mengakses pelayanan PIN Polio

Rencana tindak lanjut

- Kemenkes dan Kemenko PMK mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengerahkan upaya pelaksanaan PIN polio.
- Kemenkes melakukan evaluasi rutin setiap minggu atau per dua minggu, yang akan dibahas bersama dengan pemerintah daerah
- Dinkes melibatkan tokoh agama dan adat untuk diseminasi informasi.

Situasi Terkini

- Pada tanggal 23 Juli 2024, Kementerian Kesehatan (Kemkes) beserta Presiden RI meresmikan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio. Terdapat dua tahapan dalam kegiatan PIN polio yaitu tahap 1 dilaksanakan di Tanah Papua dan tahap 2 di 27 provinsi lain, yang menargetkan sasaran sekitar 17,3 juta anak usia 0–7 tahun. Pada acara peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana meninjau langsung pemberian vaksin polio di Posyandu Rajawali 3, Kabupaten Jayapura (gambar 1). Dalam kegiatan ini, Presiden menghimbau agar masyarakat untuk tetap waspada terhadap virus polio dan pemerintah daerah untuk mengerahkan usaha, terutama di daerah dengan cakupan imunisasi rendah.

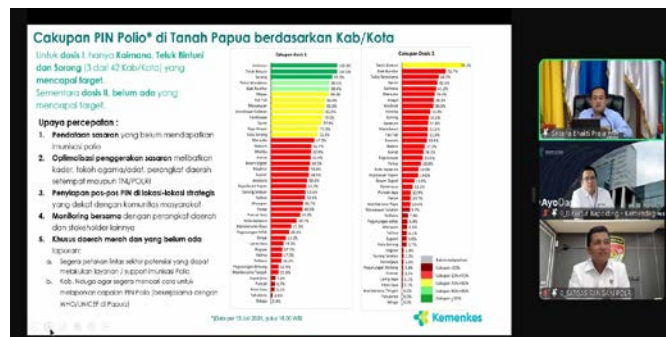


Gambar 1. Presiden RI, Joko Widodo dan Ibu Iriana meninjau langsung pemberian vaksin polio di Kabupaten Jayapura, Papua. Kredit: WHO/Rosa Panggabean (kiri)/Biro Pers Sekretariat Presiden (Kanan)



Gambar 2. Penganjangan PIN polio tahap 2 di Provinsi Sulawesi Selatan (Kiri) dan Sumatra Barat (Kanan). Kredit: WHO/Tambunan_Candora (kiri)/dan WHO/Anggreani_Novi (Kanan)

- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengevaluasi pelaksanaan PIN per dua minggu, rapat koordinasi mengundang semua stakeholders (gubernur, walikota dan bupati), lembaga dan instansi lainnya sejumlah lebih dari 700 peserta. Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), memaparkan progress dan mengarahkan agar mempercepat pencapaian cakupan PIN polio baik untuk di Tanah Papua dan 27 provinsi lainnya. Pertemuan ini juga mengajak seluruh lapisan pemerintahan untuk memberi dukungan dan melakukan monitoring secara rutin.



Gambar 3. Plt. Direktur Jenderal P2P Kemkes sedang memaparkan progress capaian PIN Polio dalam rapat koordinasi bersama Kemendagri dan pemerintah daerah.

- Dalam mempersiapkan PIN polio Tahap 2, Kemenkes, World Health Organization (WHO) dan UNICEF melakukan sosialisasi, orientasi, dan advokasi. Pada tanggal 17 Mei-19 Juli, sosialisasi pelaksanaan PIN polio telah dilaksanakan secara nasional, di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sumatra Barat, mengundang penanggung jawab program imunisasi, pemerintah daerah, media, dan jurnalis. Pada tanggal 3 Juni-22 Juli, orientasi pelaksanaan juga telah dilakukan secara nasional, di Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, mengundang penanggung jawab program imunisasi dinas kesehatan (dinkes). Pada tanggal 23 Juni-17 Juli, advokasi juga telah dilakukan secara nasional dan di Provinsi Sumatra Selatan, mengundang lapisan pemerintah daerah.

Sosialisasi dan Orientasi Pelaksanaan PIN Polio			
Peserta	Jumlah Peserta	Tanggal	Lokasi
Penanggung jawab program imunisasi dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi di 27 provinsi.	1.000	20 Mei 2024	Nasional
Penanggung jawab program imunisasi dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	183, 355, 350	17 Mei, 3 Juni, 3 Juli 2024	Sulawesi Tengah
	600	3 Juli 2024	Riau
	377	12 Juli 2024	Kalimantan Selatan
	33	15 Juli 2024	Sumatra Selatan
	160	22 Juli 2024	Kalimantan Barat
Kepala seksi atau pengelola program dinas kesehatan provinsi yang terdiri program imunisasi, farmasi, promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	132	25 – 28 Juni 2024	Nasional
Bappeda, dinas kesehatan pendidikan, kementerian agama, direktur rumah sakit, ¹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI)	143	4 Juli 2024	Sumatra Barat
Media/Jurnalis	10	4 Juli 2024	Sulawesi Tengah
Biro Komunikasi, Media, dan Jurnalis	415	19 Juli 2024	Nasional
Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan PIN			
Penanggung jawab program imunisasi dari Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	450	22 Juli 2024	Sumatra Barat
Advokasi Pelaksanaan PIN Polio			
Gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala bappeda provinsi, kanwil kemenag provinsi, kepala dinas pendidikan provinsi, ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga provinsi, dan kepala dinas komunikasi informasi dan statistik	191	23-25 Juni 2024	Nasional
Camat, kepala puskesmas, kepala dinas pendidikan, kementerian agama, kepala dinas komunikasi dan informasi (kominfo), dan organisasi profesi kesehatan	50	17 Juli 2024	Sumatra Selatan

- PIN polio tahap 1 di Tanah Papua menggunakan vaksin nOPV2 dimulai pada 27 Mei 2024, dengan sasaran 865.690 anak dan akan diadakan dalam dua putaran. Per 23 Juli, kegiatan ini telah menjangkau 50,9%

sasarannya dalam putaran pertama dan 26.7% pada putaran kedua (data dapat dilihat di tabel di bawah). Angka ini mengindikasikan cakupan imunisasi yang masih rendah pada pelaksanaan yang sudah berlangsung selama 58 hari (hampir dua bulan). Namun, enam kabupaten yang telah mencapai minimal target 90% yaitu Teluk Bintuni, Kaimana dan Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat; Sorong di Provinsi Papua Barat Daya, Biak Numfor, Provinsi Papua dan Mappi Provinsi Papua Selatan. Pada tanggal 10 Juli, telah dilakukan putaran pertama PIN polio menggunakan vaksin bOPV.

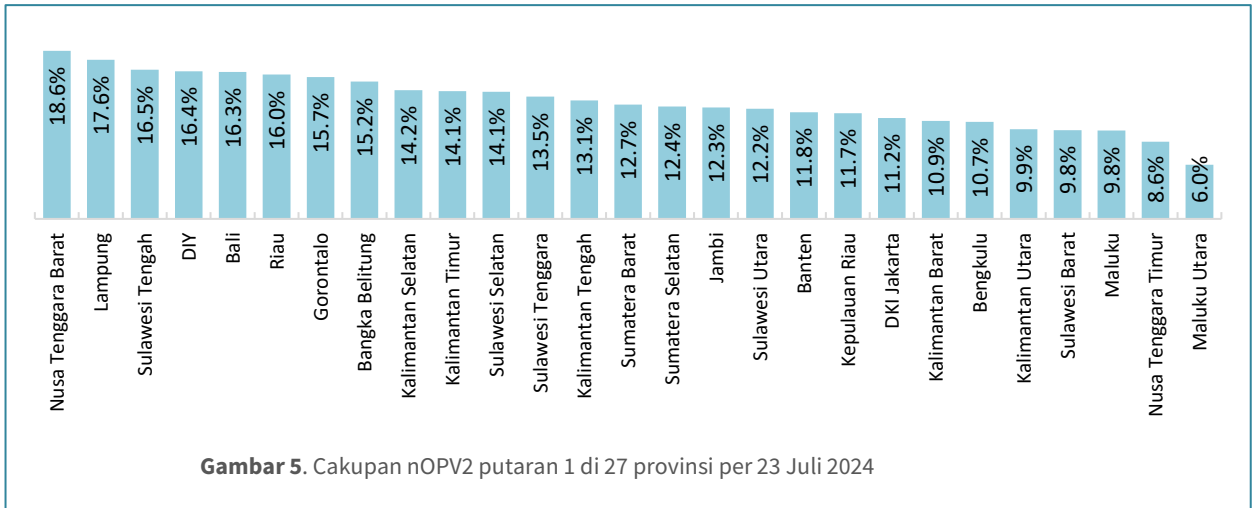
Provinsi	Sasaran anak usia 0-7 tahun	Imunisasi nOPV2 putaran 1	%	Imunisasi nOPV2 putaran 2	%	Imunisasi bOPV putaran 1	%
Papua Barat	85.718	75.813	88,4	50.918	59,2	0	0
Papua Barat Daya	91.043	68.596	75,3	25.026	27,5	0	0
Papua Selatan	119.922	84.433	70,4	43.910	36,6	334	0.3
Papua	188.659	105.865	56,1	59.550	31,6	2.736	1.5
Papua Tengah	205.121	87.942	42,9	46.965	22,9	187	0.1
Papua Pegunungan	175.227	17.986	10,3	4.375	2,5	86	0
Total	865.690	440.635	50,9	230.744	26,7	3.343	0.4

*Per 23 Juli 2024, data sasaran bersumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes



Gambar 4. Cakupan imunisasi nOPV2 putaran 1 (kiri), nOPV2 putaran 2 (tengah), dan bOPV putaran 1 (kanan) PIN polio di Tanah Papua

- Putaran PIN Polio menggunakan vaksin nOPV2 tahap 2 dimulai pada tanggal 23 Juli 2024 di 27 provinsi, dengan sasaran usia 0-7 tahun sebesar 16.420.460, dengan target harian yaitu minimal 13.6%. Cakupan PIN polio per tanggal 23 Juli, yaitu sebanyak 2.188.721 (13.3%) anak telah mendapatkan dosis 1.

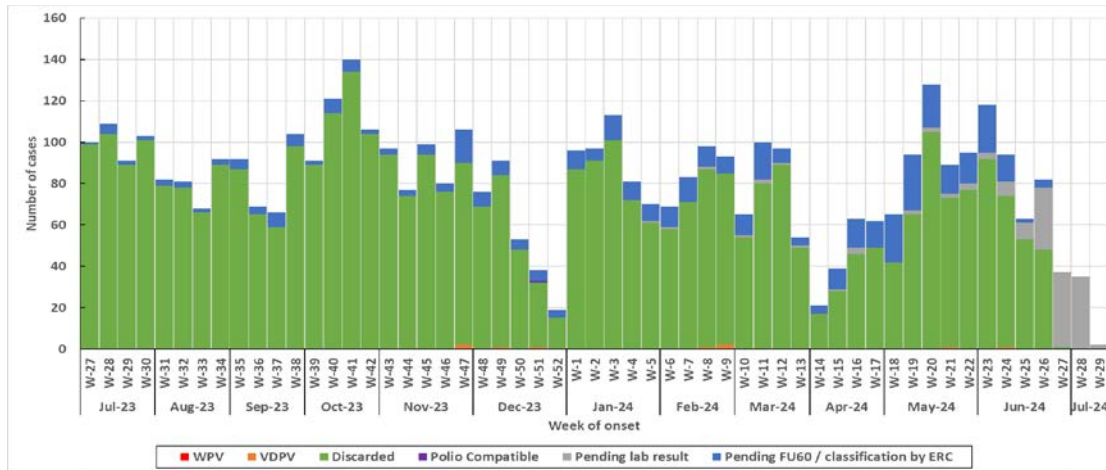


- Ketika terjadi KLB di suatu wilayah, wilayah tersebut harus mencapai non-polio AFP rate (NPAFP) >3 per 100.000 penduduk berusia di bawah 15 tahun selama KLB berlangsung. Dari wilayah yang melaporkan atau terdampak KLB di bawah ini, hanya 4 wilayah yang mencapai NPAFP di kuartal ketiga, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Selatan, dan Papua.

Provinsi	Target penemuan kasus AFP 2024	Target penemuan kasus AFP kuartal 3 2024	Kasus AFP yang telah dilaporkan	Capaian NPAFP tahunan per 100.000 populasi di bawah 15 tahun (sasaran ≥ 3)
Jawa Tengah	488	366	377	5,75
DI Yogyakarta	54	41	18	2,87
Jawa Timur	530	398	289	3,59
Banten	204	153	77	1,86
Papua Tengah	22	17	6	0,87
Papua Pegunungan	26	20	1	0,00
Papua Selatan	14	11	10	5,06
Papua	22	17	12	4,38
Papua Barat	16	12	8	2,72
Papua Barat Daya	16	12	3	0,55
Indonesia	4.448	3.346	2.217	3,49

■ Terdapat tantangan besar
 ■ Masih ada tantangan
 ■ Sasaran tercapai

- Angka pelaporan NPAFP telah meningkat dari pelaporan sebelumnya, dari 1.703 menjadi 2.217. Pada triwulan ketiga tahun 2024, targetnya adalah 3.346 laporan. Beberapa upaya untuk menemukan kasus tetap dijalankan, termasuk peninjauan laporan oleh Kemenkes, peningkatan kapasitas surveilans AFP, inisiasi pengawasan berbasis rumah sakit, dan peninjauan laporan dari kabupaten yang tidak melaporkan kasus.



WPV: Wild Poliovirus; VDPV: Vaccine-Derived Poliovirus;
 Discarded:
 1. Cases adequately investigated with no laboratory evidence of WPV or VDPV infection, OR
 2. Cases with inadequate specimens resolved within 60 days of paralysis onset or deemed not compatible with poliomyelitis by the national ERC.
 Compatible: A suspected case lacking adequate specimens with no WPV or VDPV isolation in stool, with residual paralysis after 60 days, deemed compatible with poliomyelitis by the national ERC.
 Pending Lab Result: A suspected case with collected specimens awaiting lab results.
 Pending FU60: A suspected case with inadequate specimens awaiting a follow-up visit 60 days after paralysis onset.
 Pending Classification by ERC: A suspected case with inadequate stool samples, residual paralysis, lost to follow-up, or deceased, requiring ERC classification.

Gambar 6. Klasifikasi final kasus AFP di Indonesia dalam 12 bulan terakhir, per 18 Juli 2024

Respons KLB

Perencanaan dan koordinasi

Tanggal	Tempat	Kegiatan
24 Juni 2024	Jakarta	Dari hasil koordinasi dengan Kemenkes, Kemendagri mengeluarkan surat edaran nomor 400.5.5/3148/SJ yang menghimbau pemerintah daerah dengan cakupan rendah segera meningkatkan cakupan pelayanan PIN Polio di 27 provinsi. Surat edaran ini didiseminasi melalui rapat koordinasi luring dengan semua pimpinan daerah dari Tanah Papua yang membahas pelaksanaan PIN Polio.
25 Juni 2024 dan 26-27 Juni 2024	Bogor	Kemenkes mengadakan kegiatan advokasi dan orientasi pelaksanaan PIN Polio tahap 2. Kegiatan advokasi ini dihadiri oleh 191 peserta dan kegiatan orientasi dihadiri 132 peserta dari 27 provinsi yang terdiri dari gubernur, dinkes provinsi, bappeda provinsi, kanwil kemenag provinsi, dinas pendidikan (disdik) provinsi, TP PKK provinsi, dan dinas komunikasi dan informasi (diskominfo) provinsi. Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> mendukung pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan KLB Polio serta pencegahan meluasnya transmisi virus polio melalui kegiatan PIN polio, penguatan imunisasi rutin dan surveilans. memastikan tercapainya cakupan dua dosis vaksinasi polio dengan cakupan minimum 95% untuk memutus rantai penularan virus polio; dan mengoptimalkan upaya pelacakan atau <i>defaulter tracking</i> untuk memastikan seluruh bayi mendapatkan empat dosis imunisasi polio tetes dan dua dosis imunisasi polio suntik sesuai usia, serta melaksanakan imunisasi kejar bagi anak yang terlambat mendapatkan imunisasi.

		Kegiatan orientasi kepada penanggung jawab program di dinkes provinsi menghasilkan rencana PIN polio termasuk pendatang, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Rencana ini juga menentukan pencapaian target cakupan PIN polio per dosis per putaran yaitu 95% merata di seluruh desa/kelurahan.
5 Juli 2024	Jakarta	Kemendagri mengeluarkan surat edaran No.400.5.1/2819/SJ kepada Gubernur dan Bupati di Tanah Papua yang berisi tentang pelaksanaan PIN Polio. Surat ini dihasilkan dari rapat koordinasi bersama dengan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri mengenai teknis percepatan pencapaian cakupan PIN Polio bersama pimpinan daerah. Surat ini menghimbau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan capaian PIN polio termasuk penganggaran biaya, advokasi dan sosialisasi ke pihak terkait, alokasi sumber daya, melakukan pengawasan dan pemantauan, dan melaporkan capaian. Laporan capaian dilaksanakan setiap minggu dan dikirim kepada dirjen P2P Kemenkes dengan tembusan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
24-25 Juni 2024	Papua Tengah	Dinkes Provinsi Papua Tengah mengadakan pelatihan mengenai alokasi dana untuk pelaksanaan PIN polio di Provinsi Papua Tengah. Acara ini mengundang Dinkes Kabupaten Jayapura sebagai wilayah percontohan untuk membagikan <i>best practices</i> . Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari dinkes dan kepala puskesmas. Sebagai hasil dari kegiatan ini, dinas setempat akan mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan PIN polio sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh biro perencanaan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, Dinkes Kabupaten Mimika dan WHO meninjau mikroplaning dan pemetaan wilayah yang sulit dijangkau di Puskesmas Timika dan Timika Jaya. Pendampingan ini menyarankan puskesmas untuk membuka lebih banyak pos pelayanan imunisasi dan kegiatan <i>sweeping</i> yang dibantu oleh mahasiswa dari politeknik kesehatan (poltekes).
27 Juni – Juli 2024	Teluk Bentuni, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat,	Disdik Teluk Bentuni mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan PIN polio dan mengarahkan agar guru terlibat dan mendukung imunisasi. Di wilayah lain, gubernur Sulawesi Tengah, gubernur Sumatra Barat, dan gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan surat instruksi mengenai pelaksanaan PIN polio tahun 2024. Surat ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan PIN polio, termasuk penganggaran dan pelaporan hasil langsung ke gubernur melalui sekretaris daerah.
5 Juli 2024	Jayawijaya	WHO mendampingi Dinkes Provinsi Papua Pengunungan melaksanakan pertemuan advokasi bersama Bupati Jayawijaya dan Dinkes Kabupaten Jayawijaya yang menghasilkan rencana agar perangkat daerah dan Puskesmas melibatkan berbagai sektor untuk mendukung pelaksanaan PIN Polio.
8 Juli 2024	Papua	WHO berkoordinasi dengan PMI di Provinsi Papua untuk membantu pelaksanaan PIN Polio di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang merupakan kabupaten prioritas dan membutuhkan bantuan sumber daya manusia (SDM). Dengan bantuan WHO ini, PMI Provinsi Papua akan terlibat dalam pelayanan PIN polio dan telah melakukan <i>sweeping</i> di kabupaten prioritas.
10 Juli 2024	Jayawijaya	WHO mendampingi Dinkes Jayawijaya dalam melakukan koordinasi dengan disdik untuk mendukung pelaksanaan PIN Polio. Koordinasi ini sekaligus menjadi

		<p>paparan pertama kepala dinas pendidikan tentang program imunisasi polio sebelumnya. Setelah koordinasi ini, disdik akan mengirimkan surat edaran kepada kepala sekolah, TK, dan PAUD untuk pelaksanaan PIN polio di sekolah. Pelayanan ini akan dimulai setelah libur sekolah yakni tanggal 15 Juli 2024.</p>
9-11 Juli 2024	Nusa Tenggara Timur	<p>WHO dan UNICEF mendampingi Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan advokasi dan sosialisasi secara luring mengenai dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan PIN Polio. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai sektor seperti disdik, dinas sosial (dinsos), Kementerian Agama (Kemenag), Komunikasi dan Informasi (Kominfo), PKK, TNI, polisi, organisasi profesi², Program Kerja Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), serta dinkes unit P2P dari 22 kabupaten/kota dan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk meneruskan komitmen dari hasil advokasi yang dilaksanakan oleh Kemenkes.</p>
14 Juli 2024	Fakfak	<p>WHO mendampingi Dinkes Kabupaten Fakfak melakukan audiensi dengan Wakil Bupati mengenai progres pelaksanaan PIN Polio. Terdapat tiga puskesmas yang belum mencapai target dan memiliki sasaran tertinggi yang diminta untuk membuat jadwal peningkatan cakupan dalam satu pekan. Kemudian, jadwal tersebut akan dibagikan oleh Ibu Wakil Bupati kepada organisasi perangkat daerah untuk mendukung dan terlibat dalam menggerakkan masyarakat. Ibu Wakil Bupati juga menginstruksikan tim program stunting untuk mengintegrasikan kegiatan stunting dengan PIN Polio.</p>
11 dan 15 Juli 2024	Manokwari	<p>WHO bersama Dinkes Manokwari melakukan advokasi dengan Bupati mengenai pelaksanaan PIN Polio. Kegiatan ini menghasilkan anjuran dari Bupati untuk meningkatkan kerja lintas sektor dan melibatkan organisasi perangkat daerah untuk penggerakan masyarakat. Hal ini dapat memastikan keterlibatan anak-anak di wilayahnya untuk mendapatkan imunisasi polio.</p> <p>Bupati juga ingin mengajak masyarakat membawa anak-anak ke pos imunisasi untuk mendapatkan imunisasi polio melalui video yang didiseminasi oleh Kominfo. Demi keberlangsungan PIN polio, Bupati ingin mengunjungi pos imunisasi dan menganggarkan dana untuk mendukung PIN Polio.</p> <p>Selanjutnya, Kantor Bupati Kabupaten Manokwari melakukan pertemuan evaluasi pelaksanaan dan capaian PIN Polio untuk kedua putaran yang diikuti oleh berbagai instansi. Telah ditemukan wilayah dengan cakupan rendah yang akan ditindaklanjuti dengan pertemuan strategi percepatan cakupan. Percepatan cakupan PIN polio ini akan dilaksanakan tambahan pos imunisasi di RT/RW rendah cakupan.</p>

² Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).



Gambar 7. Kegiatan advokasi dan orientasi pelaksanaan PIN Polio Tahap 2 di tingkat nasional (kiri) dan pelaksanaan advokasi di tingkat kabupaten Bersama Wakil Bupati Fakfak (kanan). Kredit: WHO/Endang Sri Utami dan WHO/Yurniati



Gambar 8. Advokasi kepada PMI di Provinsi Papua agar mendukung pelaksanaan PIN Polio (Kiri) dan Rapat koordinasi lintas sektor percepatan capaian pekan imunisasi nasional di Kecamatan Manokwari Barat (kanan). Kredit: WHO/Kornelius Langga Son (kiri) dan Dinkes Manokwari

Pelaksanaan PIN polio

Tanggal	Tempat	Kegiatan
9 Juli 2024	Merauke	WHO melakukan peninjauan pelayanan PIN polio di Posyandu Matandi, Puskesmas Kelapa Lima dan Posyandu Harapan Kita, Puskesmas Tanah Miring. Kegiatan peninjauan menemukan bahwa pemahaman orang tua dan kader mengenai sasaran imunisasi PIN polio perlu ditingkatkan. Selain itu, jam kunjungan <i>sweeping</i> perlu disesuaikan dengan waktu Ketika orang tua di rumah.
11 Juli 2024	Jayawijaya	WHO mendampingi Dinkes Jayawijaya dalam menyediakan pendampingan teknis kepada Puskesmas Asologaima dan supervisi lapangan ke Puskesmas Walelagama dalam pelaksanaan PIN polio. Kedua puskesmas ini masih memerlukan pendampingan karena kompetensi terbatas. Dari kegiatan pedampingan ini, Puskesmas Asologaima dan Walelagama diarahkan untuk terus membuka pelayanan PIN Polio agar dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan memberikan pelayanan kepada semua sasaran PIN polio. Melalui pendampingan ini diharapkan agar semakin banyak puskesmas yang memulai pelaksanaan PIN polio dan menjangkau sasaran yang lebih banyak lagi.
11 Juli 2024	Manokwari	Dinkes Kabupaten Manokwari mengadakan rapat evaluasi PIN polio yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Manokwari dan dihadiri oleh 60 peserta, termasuk Plt. Kepala Dinkes Manokwari, perwakilan dari Kemensos, Sekretaris Daerah, Dinkes, Diskominfo, Kepala Distrik,

		Lurah, Kepala Puskesmas, Petugas Imunisasi Puskesmas, Lurah, PKK, PMI, Poltekes, WHO, dan UNICEF. Rapat tersebut membahas tantangan selama pelaksanaan PIN polio di masing-masing wilayah. Tantangan yang hamper semua daerah alami adalah dukungan dari lintas sektor untuk pelaksanaan PIN polio dalam mobilisasi masyarakat. Perwakilan dari berbagai institusi berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan PIN polio. Kemajuan cakupan akan dipantau secara berkala oleh puskesmas dan dinkes Kabupaten, serta laporannya dibagikan kepada para pemangku kepentingan.
12 Juli 2024	Manokwari	WHO melakukan validasi data untuk Puskesmas Sanggeng bersama Dinkes Kabupaten Manokwari. Ketepatan dan kelengkapan pelaporan cakupan serta penggunaan vaksin dan penggunaan form standar menjadi fokus untuk memastikan keakuratan data. Selama PIN polio, terdapat beberapa form yang belum sesuai standar sehingga perlu verifikasi lebih lanjut. Menanggapi hal ini, pelatihan di tempat kerja mengenai mekanisme pencatatan dan pelaporan, dan validasi laporan manual dan laporan secara elektronik.
12-13 Juli 2024	Jayapura	WHO melakukan pemantauan dan evaluasi di Puskesmas Sentani Kota dan Puskesmas Harapan. Terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM yang mengakibatkan kegiatan PIN polio hanya dilakukan mengikuti jadwal posyandu. Tantangan lainnya yaitu pemetaan yang tidak memadai seperti peta target sasaran yang menyebabkan puskesmas mengalami kesulitan identifikasi sasaran, walaupun sudah dilakukan <i>sweeping</i> . Untuk mengatasi ini, WHO merekomendasikan puskesmas untuk melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk memobilisasi sasaran menambah pos PIN polio di puskesmas atau kantor kecamatan, melakukan pemetaan yang sesuai dan memfokuskan PIN polio pada daerah dengan tinggi sasaran, mempersiapkan daftar sasaran sebelum <i>sweeping</i> dan dilakukan secara konsisten.
8-11 Juli 2024	Boven Digoel	WHO berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten Boven Digoel mengenai pelaksanaan PIN Polio dengan petugas imunisasi, kesehatan lingkungan, dan farmasi telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, WHO juga melakukan analisis dan umpan balik cakupan sebagian besar melalui grup WhatsApp. Diskusi tersebut juga membahas tantangan seperti keterbatasan pemantauan langsung ke puskesmas-puskesmas dikarenakan keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hal ini, Kemenkes telah membuka peluang untuk meninjau kembali pengalokasian dana BOK. Hasil dari diskusi ini, petugas imunisasi dan unit perencanaan dinkes akan mengembangkan umpan balik harian dan analisis cakupan, pemetaan puskesmas dengan cakupan rendah, pemantauan penggunaan vaksin dan penetes harian, serta membantu pemantauan logistik untuk mengidentifikasi puskesmas yang memerlukan validasi pelaporan, memberikan umpan balik terkait pengelolaan limbah, dan membagikan bahan KIE.
Juli 2024	Papua Barat	UNICEF bersama Dinkes Provinsi Papua Barat melakukan pengolahan data capaian dan cakupan PIN polio sampai tingkat desa serta menyusun peta cakupan tingkat desa di Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni. Pemetaan tingkat desa ini diharapkan untuk membantu perencanaan yang lebih mendetil. Sampai saat ini, UNICEF dan dinkes provinsi sedang menyusun peta cakupan lainnya. Berikut, peta cakupan PIN Polio putaran 1 per kecamatan di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni .



Gambar 9. Supervisi Pelaksanaan PIN Polio di Boven Digoel (kiri) dan Evaluasi PIN Polio Tahap 1 di Kab. Manokwari, Papua Barat (kanan). Kredit: WHO/Candora Tambunan (kiri) dan WHO/Endang Sri Utami (kanan)

Surveilans

Tanggal	Tempat	Kegiatan
3 Juli 2024	Mappi	WHO dan Dinkes Kabupaten Mappi melakukan <i>hospital record review (HRR)</i> untuk mengkaji catatan rekam medis kasus lumpuh layu lainnya. Dari peninjauan tersebut, terdapat delapan kasus teridentifikasi dan akan dilaporkan. Hasil dari pertemuan ini adalah dinkes akan melakukan surveilans aktif di rumah sakit dan segera membentuk tim surveilans rumah sakit.
7 Juli 2024	Teluk Wondama	WHO dan Dinkes Teluk Wondama dalam memfasilitasi pertemuan surveilans PD3I yang dihadiri oleh 30 peserta. Pertemuan ini membahas mengenai performa surveilans PD3I. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah Kepala Dinas Kesehatan membentuk tim untuk pelaksanaan supervisi suportif.
10 Juli 2024	Jayawijaya	WHO mengadakan pertemuan advokasi di Rumah Sakit Wamena guna memperkuat pengawasan VPD dan AFP. Hingga saat ini, tidak ada kasus AFP yang dilaporkan oleh Kabupaten Jayawijaya. WHO berdiskusi dengan dokter anak dan kepala ruang rawat inap anak mengenai pengawasan AFP, mengenai pentingnya pelaporan kasus AFP yang dicurigai, diagnosis diferensial AFP, mekanisme pelaporan, dan pengumpulan spesimen. Bersama Dinkes Kabupaten Jayawijaya, WHO melakukan HRR dan mengidentifikasi enam kasus AFP dengan diagnosis hipokalemia yang sudah rawat jalan. Empat dari enam kasus tersebut tinggal di Kabupaten Jayawijaya dan akan ditindaklanjuti pelaporan dan intervensi terhadap kasus tersebut di Puskesmas Wamena Kota dan puskesmas wilayah pelayanan kasus tersebut.

Mobilisasi Sosial

Tanggal	Tempat	Kegiatan
6 Juli 2024	Riau	Diskominfo Provinsi Riau mengirimkan pesan melalui <i>WhatsApp</i> kepada masyarakat di Provinsi Riau untuk memberikan imunisasi polio kepada anak di bawah usia 8 tahun dengan membawa anak mereka ke pelayanan imunisasi polio.
4 Juli 2024	Sulawesi Tengah	WHO mendampingi Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah dalam sosialisasi pelaksanaan PIN polio kepada 10 media. Di dalam pertemuan media ini, dinkes provinsi mengarahkan agar pada 23 Juli 2024, semua anak di bawah usia 8 tahun dibawa ke pos pelayanan imunisasi untuk mendapatkan imunisasi polio.

5 Juli 2024	Sumatra Barat	Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala MUI membuat video himbuan singkat untuk mengajak masyarakat datang ke pelayanan imunisasi. Video ini disebarluaskan melalui media sosial seperti WhatsApp Group, Instragam, Facebook, dan lain-lain.
8 Juli 2024	Riau	Dinas Kesehatan Provinsi Riau melakukan sosialisasi pelaksanaan PIN polio kepada guru sekolah se-Provinsi Riau yang dihadiri oleh 560 guru dan kepala sekolah. Adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan guru dan kepala sekolah turut mendukung dan ikut serta saat pelayanan imunisasi polio yang akan di sekolah dasar.



Gambar 10. PMI membantu menggerakkan masyarakat agar datang ke pelayanan imunisasi polio di Kota Tarakan (kiri) dan membantu kegiatan *sweeping* PIN Polio di Kota Jayapura (kanan). Kredit: PMI Kota Tarakan (kiri) dan WHO/Ridho Wildan (kanan)

Masalah utama

- Cakupan imunisasi yang masih belum tercapai di beberapa provinsi sulit dijangkau dan memiliki isu keamanan di Tanah Papua
- Pelaksanaan monitor dan supervisi yang masih rendah di Pulau Papua
- Keterbatasan biaya pelaksanaan PIN polio
- Rendahnya komitmen dari dinkes terkait untuk menindaklanjuti dukungan pemerintah dalam pelayanan PIN polio
- Kurangnya pergerakan masyarakat dalam mengakses pelayanan PIN Polio

Rencana tindak lanjut

- Kemenkes melalui **Kemenko PMK menghimbau komitmen pemerintah daerah** agar mendorong dinkes untuk mengerahkan upaya pelaksanaan PIN polio di wilayah kerjanya, seperti peningkatan pos imunisasi, menggerakkan dan menginformasi masyarakat terkait PIN polio, dan melibatkan perusahaan milik negara dan swasta di Pulau Papua.
- Kemenkes **melakukan evaluasi rutin mengenai pelaksanaan PIN Polio setiap minggu atau per dua minggu.**
- Dinkes **melibatkan tokoh agama dan adat untuk menginformasikan pelaksanaan PIN Polio kepada jemaat.**
- Kemenko PMK mengundang pemerintah daerah, seperti **Bupati**, mengenai **evaluasi pelaksanaan PIN Polio**

dan hasil pelayanan.

Mobilisasi dukungan

Kemenkes

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PIN polio di Tanah Papua dan 27 provinsi lainnya.
- Memastikan komitmen pemerintah setempat untuk mendukung implementasi PIN polio.

WHO

- Melaksanakan advokasi, sosialisasi, dan orientasi pelaksanaan PIN polio untuk mendukung dinkes provinsi dan kabupaten/kota setempat.
- Mendampingi dinkes dan puskesmas untuk mikroplanning dalam pelaksanaan PIN polio.
- Mendampingi validasi data cakupan dan memberikan dukungan teknis.
- Melakukan supervisi pelaksanaan PIN polio
- Mengadakan sesi re-orientasi PIN polio di puskesmas dan dinkes kabupaten/kota.

UNICEF

- Membantu advokasi ke berbagai lintas program untuk mendukung pelaksanaan PIN polio
- Mengadakan kegiatan sosialisasi, termasuk penyusunan materi KIE dan mengadakan dialog interaktif di radio.

PMI

- Menggerakkan masyarakat agar mengakses pelayanan imunisasi polio.

Kementerian Kesehatan:
Direktorat Pengelolaan
Imunisasi

imunisasi.tamsus@gmail.com
survdpd3i.kipi@gmail.com

WHO:
Dr Stephen Chacko
chackos@who.int

Dr Sudhir Joshi
joshisu@who.int

UNICEF:
Dr Gopinath Durairajan
gdurairajan@unicef.org

Dr Kenny Peetosutan
kpeetosutan@unicef.org